

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Simpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bab empat dari hasil temuan penelitian melalui studi kepustakaan mengenai analisis framing Robert Entman dalam perseteruan KPK VS POLRI Jilid III pada Koran Tempo, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. *Define Problems* (Pendefinisian masalah). yang ditonjolkan oleh Koran Tempo tidak hanya berfokus pada kasus Budi Gunawan, namun Koran Tempo melakukan pembingkai bahwa POLRI menjadikan tersangka semua pimpinan KPK.
2. *Diagnose causes* (Memperkirakan masalah atau sumber masalah). Koran Tempo juga dalam beberapa pemberitaannya menjadikan Presiden Joko Widodo sebagai sumber masalah (*diagnoses Causes*) dikarenakan tidak tegasnya Presiden Joko Widodo menyelesaikan perseteruan dua lembaga Negara. Koran Tempo dengan gaya investigasinya menjadikan Presiden sebagai objek utama pemberitaan, hal ini dilihat dari jumlah pemberitaan tentang Presiden lebih banyak dari pada pemberitaan lembaga KPK dan POLRI yang sedang berseteru.
3. *Make moral judgement* (Membuat keputusan moral). Setelah keputusan prapradilan yang diputuskan oleh Hakim, Koran Tempo dengan bahasa yang tegas tetap mendukung lembaga antirasuah (KPK). Hal ini dibuktikan dengan Koran Tempo membingkai membuat keputusan moral (*Make Moral Judgement*) dengan penonjolan berita Polisi membalas dendam kepada KPK

melalui para penyidik yang menangani kasus Budi Gunawan. Para penyidik dijadikan tersangka oleh pihak Kepolisian dikarenakan keputusan prapradilan yang memenangkan Budi Gunawan.

4. *Treatment recommendation* (Menekankan penyelesaian). Penyelesaian Masalah (*Treatment Recommendation*) yang dibingkai oleh Koran tempo ialah dorongan dari Tim 9 yang meminta Presiden Joko Widodo membatalkan pencalonan Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia

Sedangkan disisi lainnya, pemberitaan Media Indonesia pemingkaiannya adalah sebagai berikut:

1. *Problems* (Pendefinisian masalah). yang ditekankan oleh Media Indonesia dalam pemberitaan ialah bahwa Polri tidak melakukan tindakan perlawanan terhadap KPK, namun Polri melayangkan prapradilan merupakan salah satu bentuk kritik terhadap lembaga KPK. Hal ini dikarenakan dalam penetapan kriteria tersangka banyak terjadi kesalahan yang dilakukan KPK, salah satunya dokumen pemeriksaan Budi Gunawan.
2. *Diagnose causes* (Memperkirakan masalah atau sumber masalah). dalam pemberitaan persetujuan KPK VS POLRI yang dibingkai oleh Media Indonesia ialah KPK yang dalam menjalankan tugas penanganan kasus tidak sesuai dengan aturan
3. *Make moral judgement* (Membuat keputusan moral). mbingkai dalam persetujuan KPK VS POLRI Jilid III dalam penilaian moral, lembaga KPK harus kembali ke cara yang benar dalam penanganan kasus korupsi di Indonesia. Selama ini KPK melanggar prosedur dalam Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana dalam penetapan tersangka kasus Korupsi. Sedangkan penilaian moral yang dilakukan Media Indonesia terhadap Budi Gunawan yang sejatinya adalah Calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia lebih kearah pemberitaan yang positif.

4. *Treatment recommendation* (Menekankan penyelesaian). dalam perseteruan KPK VS POLRI ialah kasus yang diselidiki oleh KPK tentang dugaan korupsi Budi Gunawan merupakan kasus yang tidak sah, karena didalam sidang prapradilan telah dinyatakan Budi Gunawan tidak bersalah.

## 5.2. Saran

Adapun Saran yang direkomendasikan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Media mempunyai faktor-faktor yang mempengaruhi isi sebuah pemberitaan. Salah satu faktor terbesar ialah ideologi suatu media tersebut. Ideologi media tak terlepas dari ideologi yang dipahami oleh pemilik media. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran kepada masyarakat untuk lebih kritis dan menyaring informasi yang dimuat oleh media massa.
2. Media seharusnya menjadi alat kontrol sosial, dalam menyajikan berita ke khalayak tidak hanya sesuai dengan kepentingan-kepentingan yang ingin dicapai oleh media tersebut. Karena setiap pemberitaan yang dikeluarkan, seyogyanya media massa mempunyai tanggung jawab moral karena dapat melakukan pembentukan opini publik